

Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

Peringkat Provinsi Dalam Pengembangan Ekspor (Metode *Regional Export Performance Index / REPI*)
Fahrudin Ramly

Determinant of Economic Growth in Maluku Province, periods 1986-2009 : Error Correction Approach
Yerimias Manuhutu

Pengaruh *Locus of Control* terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit dengan Kinerja Auditor sebagai Variabel Mediasi
Maria Hehanusa

Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku
Tedy Christianto Leasiwal

Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Jeanee B. Nikijuluw

Anomali Hubungan antara Angkatan Kerja dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Jefry Gasperz

Tinjauan Makro Keuangan Indonesia, periode 1998-2008
Desry Jonelda Louhenapessy

Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Skeptisisme Profesional Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Survey Persepsi Auditor Inspektorat Kota Ambon)
Ali Amin Kalau

Alternatif Pengendalian Inflasi Melalui Nilai Nilai Kearifan Lokal Maluku
Maryam Sangadji

Pengaruh Bantuan Pemberdayaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat
Ventje Jeffry Kuhuparuw

Pengaruh Dimensi Manajemen Mutu Terpadu Terhadap Perilaku Produktif Karyawan
Zainuddin Latuconsina
John H. K. Wattimena

Analisa Produksi Pala di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah
Sherly Ferdinandus

CE	Vol. VII	No. 2	Halaman 196 - 303	Ambon Desember 2013	ISSN 1978-3612
----	----------	-------	----------------------	------------------------	-------------------

TINJAUAN MAKRO KEUANGAN INDONESIA PERIODE 1998 – 2008

Desry J Louhenapessy
Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon
E-mail: desrylouhenapessy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian Indonesia selama periode 1998-2008 mencatat beberapa pencapaian pokok yang menggembirakan walaupun masih terdapat tekanan dari sisi eksternal. Untuk pertama kali sejak krisis 1998, pada tahun 2007 pertumbuhan perekonomian Indonesia berada diatas 6% dengan stabilitas yang terjaga dengan baik. Neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus, cadangan devisa meningkat menjadi US\$ 56.920 juta di tahun 2007. Daya tahan perekonomian Indonesia yang lebih baik tersebut antara lain disumbang oleh kombinasi kebijakan makroekonomi dan sektoral yang ditempuh.

Pemerintah dan Bank Indonesia senantiasa bekerja sama dalam memberikan stimulus dan menjaga stabilitas perekonomian. Di sisi moneter, respon kebijakan dilakukan secara berhati-hati dan konsisten pada upaya pengendalian inflasi pada tingkat yang semakin rendah dalam jangka menengah-panjang. Di sisi fiskal, kesinambungan keuangan pemerintah tetap dijaga dengan baik ditengah upaya untuk mengendalikan harga komoditas strategis. Sementara itu disisi perbankan fungsi intermediasi dan kelembagaan perbankan terus diperkuat, termasuk didalamnya mempercepat pengembangan perbankan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan Indonesia secara makro pada periode 1998-2008. Sehingga dari dalamnya dapat ditempuh berbagai kebijakan dalam upaya menciptakan kondisi keuangan negara yang semakin stabil.

Kata Kunci : *Keuangan negara, Perekonomian Indonesia.*

I. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia sangat erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian negara lain di berbagai kawasan di dunia, dimana dengan membaiknya kondisi ekonomi dunia memberikan peluang yang besar terhadap perekonomian Indonesia untuk dapat lebih berkembang. Dalam dunia yang makin terkait dan menyatu, kesulitan yang dialami oleh suatu negara akan menjadi pangkal kesulitan di negara lain, sebaliknya kemajuan di suatu negara dapat menjadi unsur yang mendorong kemajuan negara atau kawasan lain.

Perkembangan perekonomian Indonesia selama periode 1998-2008 mencatat beberapa pencapaian pokok yang mengembirakan meskipun mendapat tekanan terutama dari sisi eksternal . Untuk pertama kali sejak krisis 1998, pada tahun 2007 pertumbuhan perekonomian Indonesia berada diatas 6% dengan stabilitas yang terjaga dengan baik. Neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus, cadangan devisa meningkat menjadi US\$ 56.920 juta di tahun 2007, pertumbuhan kredit yang melampaui target dan laju inflasi yang mencapai target.

Pada tahun 2008 merambatnya krisis *subprime mortgage*, tingginya harga komoditas internasional terutama harga minyak mentah adalah beberapa faktor yang menorehkan tantangan dan ujian pada perekonomian Indonesia selama tahun 2007 sampai 2008. Daya tahan perekonomian Indonesia yang lebih baik tersebut antara lain disumbang oleh kombinasi kebijakan makroekonomi dan sektoral yang ditempuh. Koodinasi antara kebijakan moneter dan fiskal berjalan semakin baik.

Pemerintah dan Bank Indonesia senantiasa bekerja sama dalam memberikan stimulus dan menjaga stabilitas perekonomian.

Di sisi moneter, respon kebijakan dilakukan dilakukan secara berhati-hati dan konsisten pada upaya pengendalian inflasi pada tingkat yang semakin rendah dalam jangka menengah-panjang. Di sisi fiskal, kesinambungan keuangan pemerintah tetap dijaga dengan baik ditengah upaya untuk mengendalikan harga komoditas strategis. Sementara itu disisi perbankan fungsi intermediasi dan kelembagaan perbankan terus diperkuat, termasuk didalamnya mempercepat pengembangan perbankan syariah.

Adapun di sisi sektoral, pemerintah terus berupaya mendorong dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui perbankan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta reformasi sektor keuangan.

Namun, pertumbuhan ekonomi 2008 melambat dibandingkan tahun 2007. Inflasi di tahun 2008 melebihi target dikarenakan melambungnya harga minyak mentah diatas batas normal asumsi APBN yang mencapai US\$ 147/barrel. Hal tersebut menyebabkan pemerintah harus menaikkan harga BBM terutama harga premium dibulan Juni 2008 dari Rp. 4500/liter menjadi Rp.6000/liter, kenaikan harga BBM ini menyebabkan harga barang-barang kebutuhan mengalami kenaikan serta diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum yang rata-rata naik sebesar 10%. Oleh karena itu pemerintah berusaha terus meningkatkan daya saing perekonomian melalui perbaikan iklim investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang

perlu mendapat prioritas dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dengan struktur yang lebih sehat. Upaya-upaya tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan sisi penawaran perekonomian sehingga mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi dalam jangka menengah-panjang.

Telah kita ketahui yaitu pada tahun 2007 pemerintah sangat optimis terhadap prospek perekonomian, hingga memasuki tahun 2007 perekonomian Indonesia meraih kembali stabilitas makroekonomi pasca gejolak harga minyak pada akhir tahun 2005 yang dampaknya masih terasa dipertengahan tahun 2006. Optimisme pemerintah dilandasi oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kebijakan makroekonomi yang didukung oleh keselarasan arah kebijakan moneter yang konsisten terhadap pencapaian sasaran inflasi dan kebijakan fiskal yang berkomitmen kuat terhadap terjaganya kesinambungan fiskal.

Namun dalam perkembangannya pada pertengahan tahun 2007 perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan dari perekonomian global termasuk *subprime mortgage* di AS serta tingginya harga minyak dunia yang mendorong tingginya permintaan valas untuk kegiatan impor dan memperberat beban fiskal, terutama untuk menutup kebutuhan subsidi BBM yang terus membengkak.

Rambatan krisis *subprime mortgage* menimbulkan kecemasan yang meluas pada perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dunia dan mendorong investor global untuk menghindari asset yang dipandang memiliki resiko yang tinggi terutama aset-aset dari negara *emerging markets*.

II. ANGGARAN PEMERINTAH

Anggaran (*budget*) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu setahun (Suparmoko, 2000). Sedangkan menurut Syamsi (1994) anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah satu tahun.

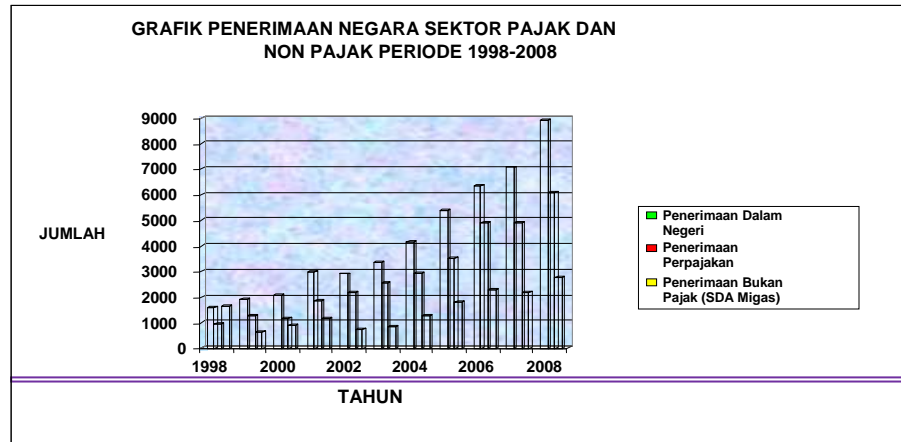
A. Penerimaan Dalam Negeri

Tabel 2.1
Penerimaan Dalam Negeri
Pajak dan Bukan Pajak
(dalam Triliun)

URAIAN	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Penerimaan Dalam Negeri	160,5	188,5	204,9	299,8	289,4	336,1	416,9	540,1	636,2	706,8	892,04
1. Penerimaan Perpajakan	96,4	128,6	115,8	184,7	216,7	254,14	289,9	352,0	490,2	491,8	609,2
a. Pajak Dalam Negeri	41,3	-	108,8	174,2	204,2	241,7	268,1	334,4	-	-	580,3
b. Pajak Perdag. Internasional	-	-	7,0	10,5	12,5	12,3	12,7	17,6	-	-	28,9
2. Penerimaan Bukan Pajak (SDA Migas)	165,8	59,9	89,2	115,1	72,6	82,01	126,7	180,7	227,0	215,0	277,7
a. Penerimaan SDA	158,1	-	76,0	86,7	55,8	59,3	91,4	144,4	158,1	124,8	192,8
b. Bagian Laba BUMN	-	-	3,9	10,4	8,2	10,4	9,8	12,0	-	-	31,2
c. PNBP lainnya	7,7	-	12,3	18,0	8,5	8,9	25,5	24,3	-	-	53,7

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia

Grafik 2.1. Penerimaan Negara sektor Pajak dan Non Pajak Tahun 1998-2008

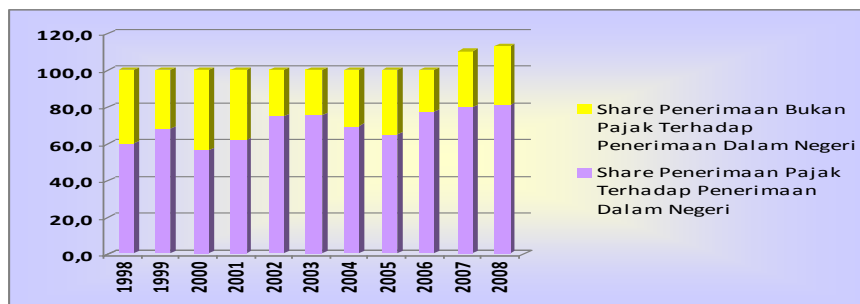


Sumber: Data diolah

Dari grafik 2.1 diatas dapat diketahui bahwa kinerja penerimaan dalam negeri dalam bentuk pajak dan bukan pajak perkembangannya dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1998 penerimaan negara di sektor pajak hanya sebesar Rp. 96,4 Triliun atau sekitar 60% sebagai penyumbang utama penerimaan dalam negeri. Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah terus meningkatkan penerimaan pajak melalui strategi dibidang perpajakan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak, peningkatan dan pengawasan, penagihan tunggakan dan penegakan hukum, penyempurnaan peraturan perpajakan. Hal ini terlihat dari kecenderungan kenaikan penerimaan pada periode berikutnya yaitu tahun 2001 yang naik menjadi Rp. 184,7 Triliun atau 62% sebagai penyumbang terhadap PDB. Namun pada tahun 2002 penerimaan negara di sektor migas turun sebesar 15% dari Rp. 115,1 pada tahun sebelumnya menjadi Rp. 72,6 Triliun pada tahun 2002. Hal ini terjadi akibat menurunnya *lifting* minyak mentah Indonesia. Kenaikan penerimaan

negara tertinggi yaitu di tahun 2008 sebesar Rp. 892,04 Triliun atau naik sebesar 12% dari tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh gencarnya pemerintah dalam menegakan aturan dalam peningkatan penerimaan pajak yang dipandang sebagai penyumbang utama penerimaan negara. Namun, penerimaan Negara di sektor Non Pajak menunjukkan perkembangan yang cukup lambat. Hal ini dipengaruhi oleh semakin menurunnya kinerja sektor migas seperti produksi minyak mentah yang semakin turun sehingga kenaikan harga minyak dunia di tahun 2003 dan 2008 tidak mampu mendongkrak penerimaan negara di sektor migas. Terlihat bahwa perkembangan PNBPN dari tahun 1998 sampai tahun 2000 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp. 165,8 Triliun pada tahun 1998 dan turun menjadi Rp. 89,2 Triliun di tahun 2000. Secara keseluruhan PNBPN cenderung fluktuatif namun kenaikan atau penurunannya relatif sama.

GRAFIK 2.2
SHARE PENERIMAAN PAJAK DAN BUKAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN DALAM NEGERI
PERIODE 1998-2008



Sumber : Laporan Tahunan BI, Data diolah.

Sementara itu share penerimaan negara dari sektor pajak pada periode 1998-2008 masih mendominasi . Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 2.2. Naiknya kinerja penerimaan pajak tercermin dari peningkatan *tax ratio* tahun 2008 yang mencapai 81,2% dari PDB, naik dari *tax ratio* tahun 2007 sebesar 79,8% dari PDB. Prestasi di sektor perpajakan tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi makro yang kondusif. Kelanjutan kebijakan perpajakan ditahun-tahun sebelumnya seperti ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap subjek dan objek pajak seperti bertambahnya jumlah wajib pajak dari sekitar 20,8 juta pada tahun 2006 menjadi sekitar 23,1 juta wajib pajak pada tahun 2007, penyempurnaan sistem dan administrasi perpajakan, peningkatan upaya monitoring pelaksanaan pajak dan kenaikan tarif cukai, ditambah dengan kondisi ekonomi makro yang positif menyebabkan naiknya kinerja penerimaan pajak. Di sisi pajak dalam negeri kenaikan utama terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPn), cukai dll. Kenaikan penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan khususnya cukai seperti rokok dan minuman yang mengandung *ethyl alcohol* maupun pengaruh kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) untuk semua jenis hasil tembakau sebesar 7% per batang/gram terhitung sejak tanggal 1 Maret 2007. Pada sisi nonpajak, terus menurunnya *lifting* minyak domestik merupakan faktor utama penurunan realisasi PNBP. Di akhir periode, yaitu tahun 2007, penerimaan di sector non pajak (PNBP) hanya menyumbang 30,4% dari PDB dan turun pada tahun selanjutnya yaitu 2008 menjadi sebesar 29,1% terhadap PDB. Sebagaimana diperkirakan dalam APBN-P 2008, kinerja PNBP mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun 2007 terutama akibat menurunnya penerimaan migas. Penurunan penerimaan migas disebabkan oleh 899.000barel/hari, lebih rendah dari asumsi sebesar 950.000barel/hari. Menurunnya realisasi PNBPN juga disebabkan melambatnya setoran laba BUMN akibat tidak diperhitungkannya *carry over* dividen BUMN dan sisa surplus Bank Indonesia.

B.Hibah

Tabel 2.1
Penerimaan Negara dan Hibah
Periode 1998-2008 (dalam Trilyun)

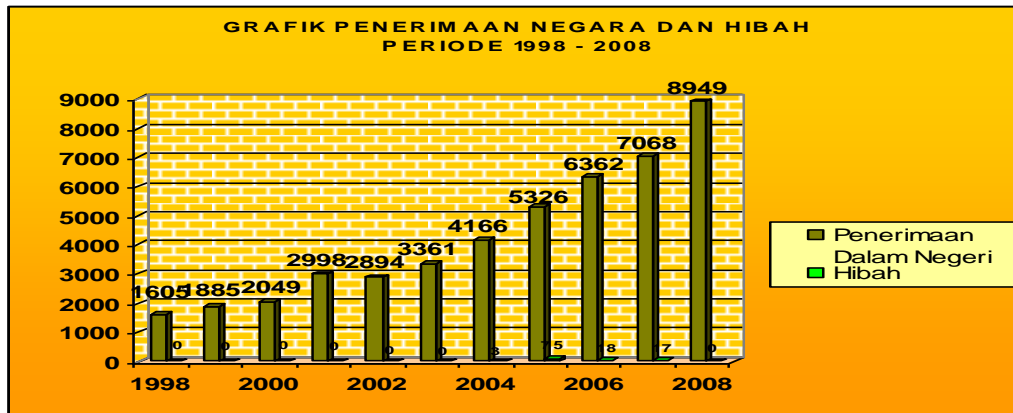
URAIAN	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Penerimaan Negara dan Hibah	160,5	188,5	204,9	299,8	289,4	336,1	416,9	540,1	638,0	708,5	894,9
Penerimaan Dalam Negeri	160,5	188,0	204,9	299,8	289,4	336,1	416,6	532,6	636,2	706,8	892,04
Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	7,5	1,8	1,7	2,8

Sumber: Laporan Tahunan BI

Penerimaan Negara dalam bentuk hibah tidak menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat tidak adanya penerimaan Negara dalam bentuk hibah selama periode 1998 sampai tahun 2004. Penerimaan Negara dalam bentuk hibah terjadi pada awal tahun 2005 sebesar Rp. 7 Triliun, hal ini terkait dengan adanya bencana Tsunami di Aceh yang menyebabkan banyaknya negara-negara lain memberikan bantuan dalam bentuk hibah. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2006 dan 2007 penerimaan Negara dalam bentuk hibah turun

menjadi Rp. 1 Triliun. Sehingga penerimaan negara dalam bentuk hibah tidak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara.

Grafik 2.3. Penerimaan Negara dan Hibah Tahun 1998-2008



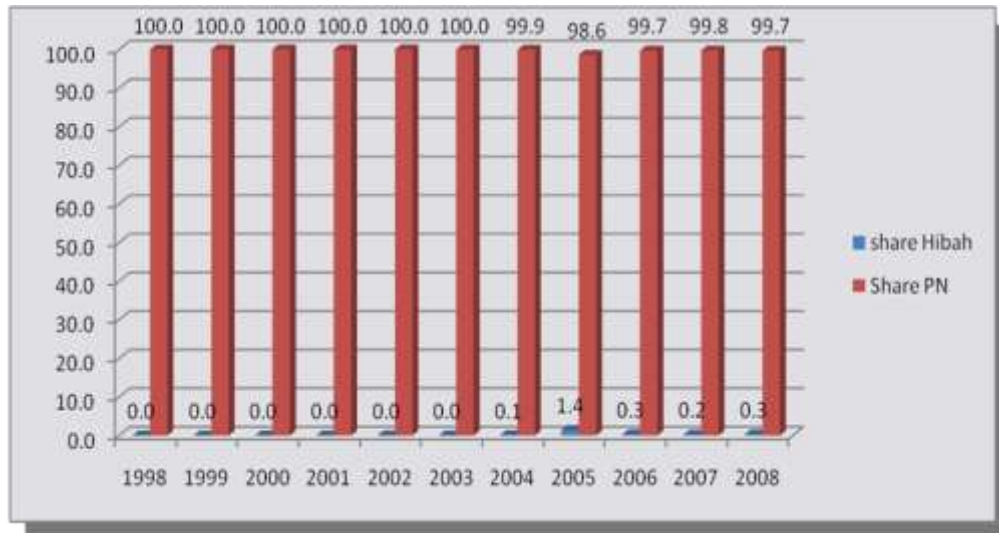
Sumber : Laporan Tahunan BI, Data diolah

Penerimaan Negara dalam bentuk hibah terjadi pada awal tahun 2005 sebesar Rp. 7 Triliun, hal ini terkait dengan adanya bencana Tsunami di Aceh yang menyebabkan banyaknya negara-negara lain memberikan bantuan dalam bentuk hibah. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2006 dan 2007 penerimaan Negara dalam bentuk hibah turun menjadi Rp. 1 Triliun. Sehingga penerimaan negara dalam bentuk hibah tidak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara.

Sementara itu share penerimaan dalam negeri dan hibah terhadap penerimaan negara dan hibah dapat dilihat pada grafik 2.4 berikut ini :

Grafik 2.4

Share Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah Terhadap Penerimaan Negara dan Hibah Periode 1998-2008



Sumber: Laporan Tahunan BI, Data diolah

Kinerja pendapatan negara dari sektor hibah sepanjang periode 1998-2008 tidak menunjukkan prestasi yang baik. Hal ini tercermin dari tidak adanya penerimaan negara dalam bentuk hibah yang menyumbang penerimaan dalam negeri selama 6 tahun yaitu dari tahun 1998-2003. Penerimaan dari hibah terjadi di tahun 2004 yang menyumbang sebesar 0,1% terhadap PDB. Penerimaan negara dari hibah tertinggi yaitu di tahun 2005 yang menyumbang sebesar 1,4 % terhadap PDB. Hal tersebut disebabkan terjadinya bencana Tsunami di Aceh sehingga banyak negara-negara lain yang menyumbang dalam bentuk hibah. Tahun berikutnya, 2006 hibah menyumbang sebesar 0,3% terhadap PDB dan kembali turun menjadi 0,2% terhadap PDB ditahun 2007. Sementara, tahun 2008 penerimaan hibah naik 0,1% menjadi 0,3% terhadap PDB.

C. Belanja Negara

Belanja negara (*public expenditure*) merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh sektor swasta dan untuk terjaminnya distribusi kekayaan yang adil.

Belanja negara yang berkesinambungan tidak dapat dipisahkan dari masalah pendanaannya. Salah satu alternatif pendekatan yang digunakan untuk melihat kedua masalah tersebut adalah melalui *Government Financial Balance*.

Tabel 2.2

URAIAN	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
B. Belanja Negara		184,1	197,0	315,8	327,08	370,5	374,4	509,6	670,6	757,3	1013,4
I. Belanja Pemerintah Pusat	82,2	170,0	163,5	234,1	228,6	253,7	255,3	361,2	424,2	504,0	735,09
1. Pengeluaran Rutin	47,5	119,3	137,3	190,1	188,4	188,5	184,4	269,5	346,5	396,8	558,02
a. Belanja Pegawai	14,5	24,5	30,7	40,0	39,4	50,2	56,7	54,3	72,9	90,4	123,5
b. Belanja Barang	8,1	11,1	9,4	9,7	11,5	15,4	17,3	29,2	47,1	54,2	67,4
c. Pembayaran Bunga Utang	6,6	24,1	54,6	76,5	90,0	81,9	65,7	65,2	79,0	79,6	94,7
d. Subsidi	9,4	14,1	30,8	54,0	40,0	25,4	26,4	120,8	107,4	150,2	234,4
e. Pengeluaran Rutin Lainnya	8,9	-	11,7	9,9	7,3	15,4	18,4	19,7	20,1	22,4	38,02
2. Pengeluaran Pembangunan	34,7	50,7	26,2	44,0	40,18	65,1	70,9	91,7	97,7	107,2	177,07
II. Dana Perimbangan		14,1	33,5	81,7	94,6	107,4	119,0	150,5	226,4	253,3	278,4

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia

Selama periode 1998 sampai 2008 belanja pemerintah terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1998 belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 82,2 Triliun dan

meningkat pada tahun 1999 menjadi sebesar Rp. 184,1 Triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pengeluaran untuk pembayaran bunga utang luar negeri. Pada tahun-tahun selanjutnya, belanja pemerintah terus mengalami kenaikan. Hal ini terlihat pada belanja negara ditahun 2006 yang meningkat menjadi sebesar Rp. 670,6 Triliun. Peningkatan belanja negara ini disebabkan oleh upaya peningkatan stimulus fiskal dan pemulihan daya beli masyarakat. Peningkatan terjadi diseluruh komponen belanja negara kecuali subsidi BBM. Peningkatan belanja negara kembali terjadi di tahun 2007 dan 2008 yang masing-masing naik menjadi Rp. 757,3 Triliun dan 1013,4 Triliun. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan belanja negara yang diwarnai oleh kebijakan stabilisasi harga, peningkatan stimulus fiskal, dan kelanjutan program pengentasan kemiskinan. Kebijakan menjaga stabilitas harga dilakukan melalui komitmen pemberian berbagai jenis subsidi. Sedangkan kebijakan peningkatan stimulus dilakukan melalui peningkatan anggaran belanja barang, infrastruktur, serta anggaran pendidikan.

Tabel 2.3
Perbandingan Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan
(dalam Triliun)

URAIAN	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Pengeluaran Rutin	47,5	119,3	137,3	190,1	188,4	188,5	184,4	269,5	346,5	396,8	1026,2
2. Pengeluaran Pembangunan	34,7	50,7	26,2	44,0	40,18	65,1	70,9	91,7	97,7	107,2	365,1

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia

Dari tabel diatas diketahui bahwa pengeluaran pemerintah rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran lainnya

masih besar dibandingkan pengeluaran untuk pembangunan. Pada tahun 1998 besarnya pengeluaran rutin sebesar Rp. 47,5 Triliun sementara pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 37,4 Triliun atau lebih kecil 21% dari pengeluaran rutin. Begitu juga untuk periode berikutnya pengeluaran rutin tetap mendominasi sebagai pengeluaran negara yang paling besar. Pada tahun 2008 pengeluaran rutin pemerintah naik tajam sebesar Rp 1026 Triliun atau 61% dari tahun sebelumnya akibat melonjaknya harga minyak dunia yang melebihi asumsi APBN sehingga yang memicu kenaikan subsidi BBM sebesar Rp. 234,4 Triliun di tahun 2008.

D. Pembiayaan Anggaran

Dalam pelaksanaan APBN pada suatu periode waktu tertentu, selalu terdapat kemungkinan bahwa antara defisit atau surplus APBN tidak dapat dipenuhi dalam jumlah yang sama dengan sumber pembiayaan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jika defisit APBN lebih besar dari pembiayaan anggaran yang tersedia, maka akan terdapat sisa anggaran kurang yang harus dipenuhi baik dari penggunaan sisa anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya, atau dengan melakukan pinjaman pada sektor perbankan dalam negeri. Sebaliknya jika defisit pada suatu tahun anggaran tertentu lebih kecil dari sumber pembiayaan yang tersedia, maka akan terdapat sisa anggaran lebih yang akan disimpan melalui sektor perbankan.

Sejalan dengan arah kebijakan untuk mengurangi beban utang luar negeri, perlu dihimpun pembiayaan dari domestik, yaitu:

- ❖ Mengupayakan penjualan aset hasil restrukturisasi perbankan semaksimal mungkin.
- ❖ Mengoptimalkan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan meningkatkan kesehatan perusahaan dan perekonomian pada umumnya.
- ❖ Menerbitkan obligasi sesuai dengan kebutuhan pembiayaan secara berhati-hati sejalan dengan daya dukung kondisi ekonomi makro.

Dalam upaya untuk memperlambat pertumbuhan stock utang luar negeri pemerintah, pembiayaan yang bersumber dari luar negeri akan lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Untuk itu proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri akan makin diseleksi dan dialokasikan terutama untuk penyediaan prasarana yang dapat mendukung investasi dan akselerasi ekonomi dalam jangka panjang. Besarnya pembiayaan anggaran pemerintah dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Pembiayaan Anggaran Pemerintah Periode 2000-2008
(dalam triliun)

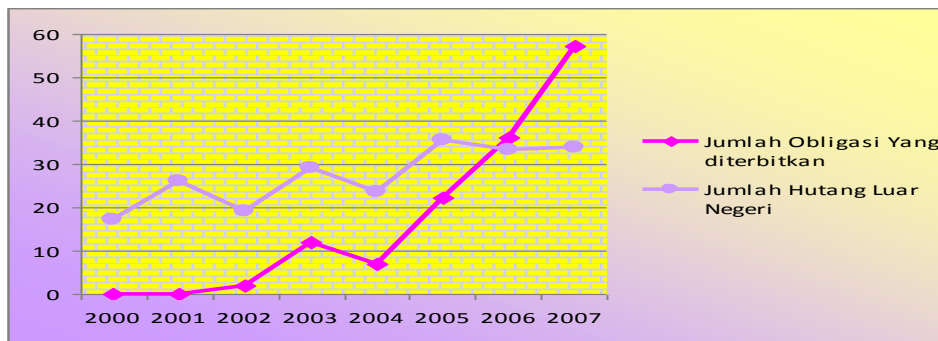
URAIAN	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pembiayaan Anggaran	15,0	40,49	26,9	34,4	29,9	24,9	33,0	48,8	94,5
I. Pembiayaan Dalam Negeri	5,4	30,22	19,6	22,4	52,9	29,8	52,3	72,7	107,6
1. Perbankan Dalam Negeri	(13,5)	(1,23)	5,5	8,5	26,8	4,3	15,2	14,9	(11,7)
2. Non-perbankan Dalam Negeri	18,9	31,45	25,5	13,9	26,1	25,5	37,1	57,8	119,3
a. Privatisasi BUMN	0,0	3,47	7,6	8,0	3,5	3,5	0,4	0,3	0,5
b. Penjualan aset prog. restrks perbankan	18,9	27,96	19,5	18,0	15,8	5,1	2,7	2,4	3,8
c. Penerimaan Penerbitan Obligasi, bersih	0,0	-	(1,9)	(12,04)	6,9	22,1	36,0	57,1	114,9
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	9,6	10,27	7,2	(11,9)	(23,0)	(4,8)	(19,3)	(23,9)	(13,1)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	17,2	26,25	19,2	29,2	23,5	35,5	33,4	34,0	48,1
2. Pembayaran Cicilan Pokok	(7,6)	(15,88)	(11,9)	(17,2)	(46,5)	(40,4)	(52,7)	(57,9)	(61,25)

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia

Sebagai komponen APBN yang dalam konsep *Government Finance Statistic* (GFS) disebut sebagai *bellow the line*, pembiayaan anggaran merupakan pelengkap yang diperlukan dalam membiayai defisit APBN bilamana terjadi defisit, atau sebaliknya menyalurkan surplus. Sejak tahun 2000, dengan perubahan struktur APBN menjadi sesuai standard GFS dimana dilakukan pemisahan terhadap beberapa komponen pembiayaan anggaran dari yang selama ini dikelompokkan ke dalam pos-pos pendapatan dan belanja negara, komposisi pembiayaan anggaran dalam APBN juga mengalami perubahan. Pembiayaan anggaran dikelompokkan menjadi dua yaitu pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri, terutama bersumber dari penerimaan negara, seperti privatisasi BUMN dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan yang dilakukan oleh BPPN. Selain itu obligasi dalam negeri juga merupakan salah satu komponen pembiayaan dalam negeri, dan dimasa yang akan datang pembiayaan yang bersumber dari obligasi pemerintah akan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam negeri. Pembiayaan dalam negeri pada item perbankan dalam negeri mengalami deficit pada tahun 2000 (Rp. 13,5 Triliun), tahun 2001 (Rp. 1,25 triliun), tahun 2008 (Rp. 11,7 triliun) _ penerimaan penerbitan obligasi bersih pada tahun 2002 (Rp. 1,9 triliun), tahun 2003 (Rp. 12,04 triliun)_ pembiayaan luar negeri (netto) tahun 2003 (Rp.11,9 triliun), tahun 2004 (Rp. 23,0 triliun), tahun 2005 (Rp. 4,8 triliun), tahun 2006 (Rp. 19,3 triliun), tahun 2007 (Rp. 23,9 triliun), tahun 2008 (Rp. 13,1 triliun)_ pembayaran cicilan pokok tahun 2000 (Rp. 7,6 triliun), tahun 2001 (Rp. 15,88 triliun), tahun 2002 (Rp. 11,9

triliun), tahun 2003 (Rp. 17,2 triliun), tahun 2004 (Rp. 46,5 triliun), tahun 2005 (Rp. 40,5 triliun), tahun 2006 (Rp. 52,7 triliun), tahun 2007 (Rp. 57,9 triliun), tahun 2008 (Rp. 61,25 triliun) semua pembiayaan anggaran dari dalam negeri dan luar negeri yang mengalami déficit ini penyebabnya adalah pengembalian pinjaman semuanya belum terpenuhi sehingga mengalami defisit pada mata anggaran yang ada.

Grafik 2.4
Penerbitan Obligasi dan Jumlah Utang Luar Negeri
Periode 2000-2007



Sumber: Laporan Tahunan BI.Data diolah.

Realisasi pembiayaan defisit APBN sepanjang periode 2000-2007 relatif sesuai dengan target. Keberhasilan pemerintah untuk mengatasi defisit melalui penerbitan obligasi (SUN) didukung oleh kondisi ekonomi makro yang positif. Namun penerbitan obligasi trend nya cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2002, jumlah obligasi yang diterbitkan pemerintah sebesar Rp. 1,9 Triliun kemudian naik tajam di tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 12,04 Triliun atau naik sebesar 533,7 %. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan besarnya pembiayaan terutama untuk pembayaran bunga utang, SUN yang jatuh tempo dan pelunasan sebagian pokok

kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia. Selain itu, jumlah utang luar negeri Indonesia juga mengalami fluktuasi sepanjang periode 2000-2008. Terlihat pada grafik bahwa pada tahun 2000 jumlah pembiayaan luar negeri sebesar Rp. 17,2 Triliun kemudian naik menjadi sebesar 26,25 triliun atau naik 52,6% dari tahun sebelumnya. Kenaikan dalam pembiayaan luar negeri ini digunakan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang dapat mendukung investasi dan akselerasi ekonomi dalam jangka panjang sehingga sehingga pembiayaannya akan lebih disesuaikan, diseleksi dan dialokasikan sebaik mungkin guna memperlambat stok utang luar negeri. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 jumlah pembiayaan luar negeri turun sebesar 26,9% menjadi Rp. 19,2 triliun. Pada tahun-tahun selanjutnya pemerintah terus berusaha untuk tidak tergantung pada pembiayaan luar negeri. Hal ini tercermin pada akhir periode yaitu tahun 2007 pembiayaan luar negeri turun sebesar 5,9% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 33,4 triliun dan naik kembali sebesar 1,8% menjadi Rp. 34 Triliun. Kenaikan tersebut relatif kecil akibat pemerintah menerapkan tiga langkah atau strategi pembiayaan mencakup peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, penurunan stok utang dan rasionya terhadap PDB secara bertahap.

E. Surplus/Defisit Anggaran

Tabel 2.5
Surplus/Defisit Anggaran
Periode 2000-2008
(dalam Triliun)

Tahun	Surplus/Defisit Anggaran
2000	-15,0

2001	-54,7
2002	-26,9
2003	-34,4
2004	-29,9
2005	-24,9
2006	-29,1
2007	-48,8
2008	-74

Sumber : Laporan Keuangan Bank Indonesia

Defisit operasional keuangan pemerintah sepanjang periode tahun 2000 sampai dengan 2008 ditutup pemerintah dengan penjualan aset program restrukturisasi perbankan, pembiayaan luar negeri netto dan privatisasi. Pada peralihan periode tahun 2000 ke 2001 defisit anggaran mencapai Rp. 547 Triliun hal ini terjadi akibat program privatisasi, belum kondusifnya pasar modal domestik maupun internasional, perbedaan kepentingan antara pasar pihak yang terlibat dalam proses privatisasi, infrastruktur maupun *Law enforcement* yang masih lemah, dan belum selesainya restrukturisasi perusahaan. relatif rendah yang disebabkan oleh Realisasi pembiayaan defisit APBN.

IV. KESIMPULAN

1. Penerimaan dalam negeri dalam bentuk pajak , perkembangannya dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penyumbang utama dalam penerimaan negara Kenaikan penerimaan negara tertinggi yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp. 892,4 Triliun atau naik sebesar 12% dari tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh komitmen

pemerintah dalam menegakan aturan dalam perpajakan seperti peningkatan dan pengawasan perpajakan, penagihan tunggakan dan penegakan hukum yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara di tahun-tahun berikutnya.

2. Selama periode 1998 sampai 2008 belanja pemerintah terus mengalami kenaikan. Hal ini terlihat pada belanja negara ditahun 2008 yang meningkat menjadi sebesar Rp. 1013 Triliun. Peningkatan belanja negara ini disebabkan oleh upaya peningkatan stimulus fiskal dan pemulihan daya beli masyarakat. Peningkatan terjadi diseluruh komponen belanja negara kecuali subsidi BBM. sebagai kelanjutan program pengentasan kemiskinan. Kebijakan menjaga stabilitas harga dilakukan melalui komitmen pemberian berbagai jenis subsidi. Sedangkan kebijakan peningkatan stimulus dilakukan melalui peningkatan anggaran belanja barang, infrastruktur, serta anggaran pendidikan.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 1998-2008 menunjukkan perkembangan yang cukup lambat. Hal ini dipengaruhi oleh semakin menurunnya kinerja sektor migas seperti produksi minyak mentah yang semakin turun sehingga kenaikan harga minyak dunia di tahun 2003 dan 2008 tidak mampu mendongkrak penerimaan negara di sektor migas.
4. Penerimaan negara dalam bentuk hibah pada burun waktu 1998-2004 tidak ada, hanya terjadi pada awal tahun 2005 sebesar Rp. 7.5 triliun. Hal ini

berkaitan dengan adanya bencana Tsunami di Aceh yang menyebabkan banyaknya negara lain memberikan bantuan dalam bentuk hibah.

5. Pengeluaran pemerintah rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran lainnya masih besar dibandingkan pengeluaran untuk pembangunan. Pada tahun 2008 pengeluaran rutin pemerintah naik tajam sebesar Rp 1026 Triliun atau 61% dari tahun sebelumnya akibat melonjaknya harga minyak dunia yang melebihi asumsi APBN sehingga yang memicu kenaikan subsidi BBM sebesar Rp. 234,4 Triliun di tahun 2008.
6. Defisit operasional keuangan pemerintah sepanjang periode tahun 2000 sampai dengan 2008 ditutup pemerintah dengan penjualan aset program restrukturisasi perbankan, pembiayaan luar negeri netto dan privatisasi. Pada peralihan periode tahun 2000 ke 2001 defisit anggaran mencapai Rp. 547 Triliun hal ini terjadi akibat program privatisasi, belum kondusifnya pasar modal domestik maupun internasional, perbedaan kepentingan antara pasar pihak yang terlibat dalam proses privatisasi, infrastruktur maupun *Law enforcement* yang masih lemah, dan belum selesainya restrukturisasi perusahaan. relatif rendah yang disebabkan oleh Realisasi pembiayaan defisit APBN.

Daftar Pustaka

Bunga rampai kebijakan fiskal. Badan Analisa Fiskal. Departemen Keuangan RI Japan International Cooperation Agency. Jakarta, 2002

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998*. Jakarta.

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 1999*. Jakarta.

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2000*. Jakarta.

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001*. Jakarta.

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2002*. Jakarta.

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2003*. Jakarta.

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2004*. Jakarta.

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2005*. Jakarta.

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2006*. Jakarta.

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2007*. Jakarta.

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2008*. Jakarta.

Departemen Keuangan Indonesia. *Data Pokok APBN-P dan APBN 2009*. Jakarta.

Suparmoko, M. *Keuangan Negara dalam teori dan praktik* edisi 4. BPFE, Yogyakarta. 1997

Suparmoko, M. *Keuangan Negara dalam teori dan praktik* edisi 5. BPFE. Yogyakarta. 2003

Syamsi Ibnu, 1994. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rineka Cipta Jakarta

Zainul Basri, Yuswar dan Mulyadi Subry. *Keuangan Negara dan Analisa Kebijakan Utang Luar Negeri*. Edisi 2. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005